

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam Perserikatan Bangsa Bangsa terdapat organisasi internasional yang bernama UN Woman. Organisasi internasional yang bernama UN Woman ini berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Isu gender dan pemberdayaan ini diangkat sebagai fokus jalan dalam UN Woman karena banyak sekali peristiwa diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, ketidaksetaraan gender. Hal ini merupakan isu yang tiada habisnya. Isu ini sudah merebah ke dunia Internasional. Banyak sekali negara yang didalamnya mendapatkan isu kekerasan terhadap perempuan. UN Woman sudah berdiri sejak 2 Juli 2010. Dalam kurun waktu sampai sekarang UN Woman ini sudah sering menangani kasus diskriminasi, kekerasan perempuan di seluruh negara. Dengan adanya UN Woman ini sangat memberikan kontribusi yang mendukung dalam menyelesaikan sebuah isu diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan dan lain – lain.

Dalam dunia internasional dalam isu kekerasan terhadap perempuan ini termasuk sejarah pembentukan UN Women yang adanya ketetapan majelis umum PBB mengenai *women in development*, *Deklarasi Beijing*, *The UN Decade for Women*, *CEDAW*, *Deklarasi Mexico*, dan *Beijing Platform for Action*. Pada tahun 1975 *women in development* telah ditetapkan oleh majelis umum PBB. *women in development* menerapkan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dan proses peningkatan perempuan untuk memperbaiki status perempuan. Dalam *women in development* memiliki tiga pondasi yaitu persamaa, perdamaian, dan pembangunan. 10 tahun kemudian dari 1975 sampai 1985 *women in development* dipandang sebagai dekade PBB untuk wanita. Pada zaman itu menjadikan penting karena memulai membahas isu feminisme dan pada tahun 1975 mengeluarkan

dua hasil *Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peacedan World Plan of Action for the Implementation of the Objectives of the International Women's Year*. Selanjutnya pada tahun 1980 adanya Konferensi Kopenhagen untuk membahas laporan Deklarasi Meksiko dan *World Plan of Action*. Selanjutnya pada tahun 1985 dilanjutkan konferensi di Nairobi. Pada tahun 1995 diadakan konferensi dunia IV di Beijing dan menghasilkan deklarasi Beijing. Di India, Beijing Platform for Action itu sendiri tercermin pada Rencana Lima Tahun yang ke-10 (Tenth Five Years Plan) dan Kebijakan Nasional India untuk Pemberdayaan Perempuan tahun 2001.

Kekerasan terhadap perempuan ini merupakan suatu masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang. Beberapa negara telah menghadapi masalah kekerasan terhadap perempuan ini antara lain Amerika Serikat, India, Tunisia, Lebanon, Swedia, dan masih banyak lagi negara yang menghadapi isu kekerasan terhadap perempuan ini. Kekerasan terhadap perempuan ini menjadikan isu internasional. Negara yang ada didunia ini mulai memperhatikan isu ini. Kekerasan terhadap perempuan ini disetiap negara mengalami peningkatan yang pesat, hal ini menunjukkan betapa besar isu ini jika menimpa suatu Negara (Murdaningsih, 2017).

Pada tahun 2010, India telah sudah mengesahkan *protection of women from sexual harassment bill*, suatu kebijakan tentang pemberian hukuman berat terhadap pelaku pelecehan dan kekerasan seksual. Pemerintah India dan UN Women ini membuat kebijakan yang didasarkan oleh CEDAW yang bertujuan penghapusan diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan dan gender. Disisi lain pemerintah India dalam kebijakannya berusaha mengurangi tingkat aborsi di India. Disini pemerintah India memberikan tunjangan bersyarat seperti jaminan kesehatan ibu hamil dan anak, serta pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah untuk perempuan dalam bidang pendidikan. Pandangan dunia terhadap India dirasa kesulitan maka dengan adanya bantuan

dari UN Woman ini masuk dan menangani kekerasan perempuan di India ini (nishithdesai associates, 2019).

Negara yang paling beresiko mengenai isu kekerasan terhadap perempuan ini adalah India. Di negara India terdapat data isu kekerasan pada perempuan di tahun 2011 sampai 2015. Dari data yang diambil ini menunjukkan peningkatan isu kekerasan perempuan di India. Dari tahun 2011 terdapat 228.649 kasus, tahun 2012 terdapat 242.270 kasus, tahun 2013 terdapat 309.546 kasus, tahun 2014 terdapat 337.922, dan pada tahun 2015 terdapat 327.394. dari data yang diambil ini menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Korban yang ada di negara India ini yaitu perempuan. Dari sekian banyaknya kasus tiap tahun itu adalah kasus yang sudah dilaporkan ke pihak peradilan. Selain itu juga terdapat kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak pengadilan karena merasa malu atau tidak memiliki “power”.

Perolehan data dari tahun 2011 – 2015 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di India. Tingginya isu kekerasan di India ini sudah menjelaskan bahwa kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan pelaku tidak diadili melalui jalur hukum. Selain itu kurangnya penyembuhan korban dari segi fisik maupun mental. Hal ini juga muncul pemikiran masyarakat yang negatif tentang perempuan. Dengan adanya kekerasan perempuan yang semakin tinggi di India ini tentunya negara sudah mengatur konstitusi dengan adanya pers dari organisasi internasional. Meskipun banyak laporan tentang kekerasan terhadap perempuan ini, kekuatan hukum yang ada di India ini juga tidak begitu kuat. Maka dari itu setiap ada laporan kasus tentang kekerasan terhadap perempuan ini, India menganggap sebagai isu yang tidak begitu krusial dibandingkan isu lainnya.

Dalam data United Nation Gender Inequality Index (GII) menempatkan India adalah negara yang masuk dalam 5 besar negara yang mendapatkan isu kekerasan terhadap perempuan. Selain India juga terdapat di Afghanistan, Kongo,

Pakistan, dan Somalia. India mendapatkan angka sebesar 0,617 dibanding negara lainnya. Pada tahun 2012 juga dilakukan survei dan perempuan di India telah banyak mendapatkan kekerasan setelah Arab Saudi. Bagi India sendiri isu kekerasan terhadap perempuan ini merupakan hal yang wajar. Dan menurut data National Crime Records Bureau tahun 2015, angka sebesar 34,6% kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh kerabat atau keluarga dan 25% diikuti dengan intimidasi, pemerkosaan sebesar 10,6%, penculikan perempuan sebesar 18% di tahun 2015. Hal ini mengalami peningkatan dari awalnya tahun 2011 yang mencapai 9,4% dan di tahun 2015 mencapai 11,1%. National Crime Records Bureau menunjukkan data keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan ini tiap tahunnya meningkat pada tahun 2011 mencapai 228.649 korban, pada tahun 2012 mencapai 242.270 korban, pada tahun 2013 mencapai 309.546 korban, pada tahun 2014 mencapai 337.922 korban, dan pada tahun 2015 mencapai 327.394 korban. Terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun (Christiyaningsih, 2019).

B. Rumusan masalah

Bagaimana peran UN Woman dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di India terkait kekerasan perempuan tahun 2011-2015?

C. Kerangka Teori

1. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah kumpulan dari beberapa negara berdaulat atau yang sudah merdeka untuk membentuk suatu tatanan masyarakat sosial dengan tujuan yang sama. Selain itu Organisasi Internasional bisa juga didefinisikan sebagai kerjasama antar negara yang sudah melewati batas kedaulatan negara yang didasarkan pada struktur yang jelas sehingga dalam menjalankan fungsinya

tersebut mampu untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dan perlu adanya kesinambungan antar negara, pemerintah dan non pemerintah yaitu masyarakat. Definisi dari Organisasi Internasional ini sangat luas, termasuk beberapa ahli yaitu Bowett D.W., lalu ada Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr., dan Clive Archer Para ahli ini sudah mendefinisikan Organisasi Internasional menurut masing – masing. Didalam penelitian ini penulis memaparkan konsep organisasi internasional menurut Clive Archer. Didalam bukunya yang berjudul “International Organization” ditulis oleh Clive Archer organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (Pemerintah atau Nonpemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.

Didalam buku yang diciptakan oleh Clive Archer yang berjudul “International Organization” telah memaparkan peran dari organisasi internasional tersebut. Didalam buku yang dikarang oleh telah mengategorikan tiga peran dalam organisasi internasional yaitu sebagai Instrumen, arena, dan aktor independen. Dalam penulisan ini penulis akan menerapkan teori Organisasi Internasional bagian sebagai Arena.(Archer, 2014). Sebagai arena Organisasi internasional ini merupakan tempat untuk berkumpulnya para anggota negara yang sudah berdaulat untuk membahas suatu masalah di suatu negara bahkan membahas masalah dari negara lain juga agar masalah ini bisa mendapatkan perhatian dunia internasional. Peran organisasi internasional sebagai arena ini membuka wadah atau forum, bagi setiap anggota negara untuk mendiskusikan suatu masalah yang krusial atau mempunyai pengaruh yang besar. Dalam wadah ini suatu negara dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara lain maupun organisasi internasional itu sendiri. organisasi internasional ini digunakan oleh suatu negara untuk

merumuskan suatu perjanjian atau memutuskan suatu kebijakan (Archer, international organization, 2014).

Peran UN Woman sebagai arena, UN Woman selalu memberikan forum untuk menyampaikan sebuah masalah. UN Woman digunakan oleh India sebagai wadah dalam menyampaikan permasalahan. Disinilah UN Woman mencari dukungan ke negara lain untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan perempuan di India. Untuk mendiskusikan suatu masalah tentunya harus melewati mekanisme pelaporan yang sudah dirancang oleh UN Women. Hal ini tentunya memberikan forum untuk India bisa menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di India (Archer, international organization, 2014).

UN Women sebagai *legal personality* di mata Internasional, lembaga internasional dibawah naungan PBB ini mampu membangun relasi seperti korporasi, organisasi, maupun negara lebih baik yang berfokus secara langsung pada pemberdayaan perempuan. selain itu secara tidak langsung seperti upaya adanya integrasi global secara umum. Sebagai salah satu badan PBB yang berfokus pada kesetaraan gender ini, UN Women mempunyai framework yaitu dengan berkontribusi dalam keamanan dan perdamaian yang difokuskan dalam meningkatkan kepemimpinan perempuan dan partisipasi perempuan tersebut. Dalam hal keefektifan UN Women dalam tujuannya salah satunya dalam prinsipnya yaitu kemanusiaan, terdapat tiga dimensi. Prinsip ini dapat digunakan sebagai sarana untuk membantu peran UN Women itu sendiri yakni, dimensi kebijakan dan normatif, dimensi program dan operasional, dan dimensi kapasitas organisasi. Pertama, dimensi kebijakan dan normatif, UN Women ini sebagai inisiator untuk pembangunan yang lebih maju untuk perempuan yang sudah didasarkan Resolusi PBB 1325. *Gender responsive* merupakan hal normatif yang melibatkan perempuan dalam melihat fenomena di India ini walaupun India telah meratifikasi konvensi CEDAW tahun 1993. Kedua, dimensi program dan oprasional, hal ini yang dilakukan UN

Women Development Result Framework (DRF) dan *Management Result Framework* (MRFs). Ketiga dimensi kapasitas organisasi, dimana UN Women ini menggunakan otoritas sebagai lembaga bagian dari PBB untuk melakukan koordinasi dari dua dimensi sebelumnya yaitu dimensi kebijakan dan normatif serta dimensi program dan operasional dalam integrasi dan perlindungan perempuan.

2. Konsep kekerasan

Dalam masalah kekerasan perempuan di India ini terdapat konsep yang berkaitan dengan kekerasan perempuan yang dinamakan konsep kekerasan perempuan. Secara umum kekerasan adalah suatu tindakan yang mengacu kepada tingkah yang tidak manusiawi, sehingga dapat menimbulkan korban dan merugikan satu sama lain. Konsep kekerasan ini terdapat beberapa orang yang ahli dalam kekerasan ini, salah satunya adalah Johan Galtung. Konsep kekerasan menurut Johan Galtung adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain. Kekerasan menurut Johan Galtung ini memiliki makna yang sangat luas. Johan Galtung memberikan kategori terhadap kekerasan seperti kekerasan fisik, verbal, penghinaan, pembunuhan, dan lain - lain. Johan Galtung menggambarkan kekerasan ini adalah suatu hal yang harus dihindari untuk mengurangi tingkat kepuasan orang lain dalam berbuat kekerasan. Menurut Johan Galtung kekerasan berasal dari kebutuhan yang sudah melewati batas yang akan menimbulkan korban dan orang yang melakukan kekerasan tersebut akan diberikan sanksi secukupnya. Johan Galtung membagikan tiga kategori tentang kekerasan (Eriyanti, 2017).

Yang pertama kekerasan Kultural. Kekerasan yang berasal dari ideologi, seni, budaya. Kekerasan kultural yaitu sebagai sikap yang sudah kita tanam atau diberikan sejak kecil dan diterapkan dalam kehidupan ini. Hal ini bisa berkaca pada

zaman dahulu tentang perang. Seseorang atau kelompok harus memenangkan atau menguasai lawannya. Hal ini yang sudah ditanamkan sejak zaman dahulu dan berangsur sampai sekarang. Menurut Galtung membunuh seseorang tetap saja dinamakan pembunuhan, tetapi jika membunuh ratusan orang dinamakan perang.

Yang kedua yaitu kekerasan langsung, Kekerasan langsung ini terdapat berbagai macam bentuknya, secara makna dari kekerasan langsung ini fokus pada fisik seseorang. Bentuk kekerasan langsung ini seperti pemukulan, pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual. Selain kekerasan fisik itu juga terdapat kekerasan verbal berupa penghinaan, ini juga termasuk dalam kategori kekerasan langsung. Johan Galtung menggambarkan kekerasan ini sebagai gangguan yang harus dihindari terkait kebutuhan dasar manusia, kebutuhan hidup yang layak. Kekerasan yang digunakan sebagai ancaman juga disebut kekerasan.

Yang ketiga yaitu kekerasan struktural Selain kekerasan kultural dan langsung, terdapat kekerasan secara struktural. Kekerasan struktural ini tidak dilakukan individu, dalam melakukan kekerasan tersebut dilakukan secara tersembunyi dan mengarah ke struktur yang kecil maupun besar. Dalam kekerasan struktural, pelaku akan mengincar suatu kelompok yang mempunyai kekuatan yang lemah. Kekerasan ini dibuat secara struktur, yang langsung lebih disiapkan. Kekerasan struktural ini terdapat empat hal yang selalu berkesinambungan yaitu Penetrasi, segmentasi, marginalisasi dan fragmentasi. Penetrasi memmbuat suatu pandangan kepada kelompok yang lemah, segmentasi memberikan sesuatu yang sedang terjadi. Selanjutnya marginalisasi ini menjaga kelompok yang lemah agar tidak melebihi batas aman dan berkaitan dengan fragmentasi yang menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Johan Galtung membagi beberapa macam kekerasan struktural antara lain kekerasan terhadap alam, kekerasan terhadap diri sendiri,

kekerasan terhadap orang lain, kekerasan terhadap masyarakat, kekerasan terhadap budaya (Galtung, 1969).

Di India pada tahun 2011-2015 ini terjadi kekerasan terhadap perempuan, bentuk kekerasannya itu berupa ancaman, pembunuhan, pemerkosaan, diskriminasi. Bentuk kekerasan ini berkesinambungan dengan konsep kekerasan yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu kekerasan langsung, struktural dan kultural. Di negara India terdapat data isu kekerasan pada perempuan di tahun 2011 sampai 2015. Dari data yang diambil ini menunjukkan peningkatan isu kekerasan perempuan di India. Dari tahun 2011 terdapat 228.649 kasus, tahun 2012 terdapat 242.270 kasus, tahun 2013 terdapat 309.546 kasus, tahun 2014 terdapat 337.922, dan pada tahun 2015 terdapat 327.394. dari data yang diambil ini menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Korban yang ada di negara India ini yaitu perempuan. Data yang diperoleh dari National Crime Records Bureau kekerasan terhadap perempuan dengan presentase 34,6% dilakukan secara kekerasan, lalu disusul 25,2% dilakukan secara intimidasi, lalu 18,1% dilakukan penculikan perempuan dan 10,6% terjadinya pemerkosaan terhadap perempuan di India. Hal ini terus terjadi peningkatan dari tahun 2011 dengan presentase 9,4% naik ke tahun 2015 dengan presentase 11,1%. Dengan kekerasan ini perempuan di India mendapatkan kekerasan secara langsung dan struktur perempuan di India akan dipandang rendah dan budaya perempuan di India juga dipandang rendah di dunia internasional.

3. Teori Rezim

Teori rezim merupakan sebuah teori yang berasal dari tradisi liberal. Teori ini mempunyai dasar bila realisme menganggap bahwa konflik merupakan norma dalam hubungan internasional. Dalam teori ini menganggap bahwa kerja sama dapat dibina walaupun dalam keadaan anarki. Contoh dari teori rezim ini adalah kerja sama perdagangan,

hak asasi manusia dan keamanan kolektif. Teori rezim ini berpendapat bahwa organisasi internasional memengaruhi perilaku suatu negara dan pelaku internasional lainnya. Teori ini menyatakan bahwa kerja sama mungkin terjadi dalam sistem anarki dunia karena rezim sendiri adalah hasil dari kerja sama internasional.

Dalam teori rezim ini berupaya menjelaskan terjadinya kerjasama antar negara dengan berfokus pada peran yang dimainkan rezim dalam mengurangi anarki internasional dan mengatasi berbagai masalah tindakan kolektif antar negara. Berbagai aliran pemikiran dalam hubungan internasional telah muncul dan berbagai pendekatan analitis ada didalam teori rezim. Teori rezim ini dikaitkan dengan institusionalisme neoliberal yang dibangun di atas kepastian bahwa rezim adalah pusat dalam memfasilitasi internasional. Kerjasama dan membatasi perilaku negara. Jadi, dalam hubungan internasional teori rezim sering digunakan secara bergantian dengan istilah “institusionalisme” atau “institusionalisme neoliberal”.

Rezim merupakan sebuah prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan dimana harapan para aktor bertemu di area tertentu dalam hubungan internasional. Rezim menciptakan konvergensi ekspektasi, menetapkan standart perilaku, dan menumbuhkan rasa kewajiban umum. Rezim mengurangi anarki yang jika tidak terjadi akan terjadi dalam hubungan internasional dan dengan demikian memfasilitasi kerja sama diantara negara dan aktor potensial lainnya. Rezim internasional hendaknya tidak dilihat sebagai pemerintah yang tujuannya adalah menciptakan otoritas terpusat untuk mengatur politik dunia. Lebih akurat untuk memikirkan rezim sebagai institusi yang melibatkan negara dan juga aktor non negara yang berusaha mewujudkan tujuan dan struktur jangka panjang mereka dan menstabilkan hubungan mereka untuk kepentingan semua anggota rezim.

Rezim ada di berbagai domain politik internasional. Misalnya, *Collectivesecurity regimes* meliputi United Nations termasuk norma, prinsip, dan prosedur PBB yang membatasi penggunaan kekuatan dalam urusan luar negeri. Selain itu *International Bank for Reconstruction and Development (IBDR)*, *International Monetary Fund (IMF)*, *World Trade Organization (WTO)*, *Human Rights Regimes* termasuk konvensi eropa untuk perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dan berbagai perjanjian internasional dan norma adat yang melindungi sipil, politik, hak ekonomi dan sosial. Rezim secara tradisional dianggap terdiri dari negara – negara. Namun, studi rezim yang lebih baru mengakui bahwa rezim yang terdiri dari organisasi non-pemerintah atau individu juga dapat memandu dan mengatur perilaku negara dan berbagai aktor non-negara seperti perusahaan, kelompok, individu (Bradford, 2007).

D. Hipotesis

Untuk membentuk suatu hipotesis, maka dapat ditarik hipotesa atas peran UN Woman dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah India terkait kekerasan perempuan pada tahun 2011-2015 yaitu :

1. Sebagai arena UN Women menjadi tempat untuk mendiskusikan isu kekerasan terhadap perempuan melalui mekanisme pelaporan pelaksanaan CEDAW.
2. Sebagai rezim, UN Women mendorong kemunculan rezim anti kekerasan terhadap perempuan yang termanifestasi dengan CEDAW, sehingga meminta negara – negara (India) untuk menandatangani, meratifikasi sehingga menurunkan Perundang – undangan terkait kekerasan terhadap perempuan di India.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep organisasi internasional untuk menjelaskan UN Women

sebagai organisasi internasional dan konsep kekerasan untuk menggambarkan suatu keadaan di India terkait kekerasan terhadap perempuan serta teori rezim sebagai bentuk kerjasama UN Women dengan India.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran UN Woman dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di India terkait kekerasan perempuan tahun 2011-2015. Pada tahun tersebut memang terjadi banyak kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai macam bentuknya dari pembunuhan, pemerkosaan, penculikan dan masih banyak bentuknya. Dari tahun 2011-2015 ini terjadi kekerasan perempuan secara besar – besaran karena kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan pelaku tidak diadili melalui jalur hukum. Pemerintah India sudah mengesahkan kebijakan tentang kekerasan perempuan tetapi masih belum berhasil maka dari itu butuh bantuan dari UN Woman untuk mengatasi kekerasan perempuan di India ini.

Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan studi dari studi hubungan internasional di “Universitas Muhammadiyah Yogyakarta” dengan menggunakan teori yang disebutkan untuk memberikan kontribusi penelitian terutama untuk departemen hubungan internasional disamping itu, bertujuan mencapai gelar sarjana dalam jurusan Hubungan Internasional, fakultas sosial dan politik, “Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode pengumpulan dan analisa data

Dari penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari sumber penelitian perpustakaan, artikel, buku, jurnal serta buku referensi yang berbentuk media elektronik untuk mengetahui tentang peran UN Woman peran UN Woman dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di India terkait kekerasan perempuan

tahun 2011-2015. Dalam penyajian data penelitian ini merupakan kualitatif. Penelitian yang menampilkan data – data yang cukup untuk menggambarkan suatu masalah terkait peran UN Woman dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di India terkait kekerasan perempuan tahun 2011-2015. Data penelitian digunakan terkait dengan kondisi pada masa 2011-2015 terkait peran UN Woman dalam mempengaruhi kebijakan India terkait kekerasan perempuan. Sehingga dalam penelitian yang berbentuk kualitatif ini akan memahami sebuah fenomena yang sudah terjadi pada masa lalu yang dipresentasikan dalam bentuk bahasa atau kata – kata.

G. Jangkauan Penelitian

Kekerasan perempuan ini sudah terjadi sejak lama dan sudah terjadi di belahan dunia. India merupakan negara yang paling tinggi angka kekerasan perempuan. Di India pun fenomena kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi fenomena yang sering terjadi tiap tahunnya, tetapi pada tahun 2011-2015. Dalam kurun 5 tahun yang berlanjut menjadi tahun yang mengerikan karena tingkat korban kekerasan perempuan ini meningkat tiap tahunnya, hal ini dikarenakan kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan pelaku tidak diadili melalui jalur hukum.

H. Sistematika

Dalam sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari kerangka garis besar yang sudah jelas terdiri dari lima bab, berikut merupakan uraian garis besar.

BAB I : Merupakan bab yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka tori, hipotesis yang sudah ditentukan serta metode penelitian yang sudah tertera dalam penelitian ini.

- BAB II : Membahas tentang UN Woman baik dari latar belakang UN Woman, Sejarah UN Woman, perkembangan UN Woman, struktur, fungsi UN Woman dan peran UN Women
- BAB III : Merupakan bab yang membahas tentang data kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di India pada tahun 2011-2015.
- BAB IV : Menjelaskan tentang peran UN Woman dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah India terkait kekerasan perempuan pada tahun 2011-2015.
- BAB V : Membahas tentang kesimpulan dari penelitian ini dan penjelasan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya.